

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Adami Chazawi. 2008. *"Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi"*. Bandung; PT. Alumni

Adnan Buyung Nasution, *"Paradigma Baru Pemberantasan Korupsi Tekad dan Perangkat Baru Menyapu Korupsi"*. Makalah disampaikan dalam diskusi panel di Hotel Santika Bandung, 2 Mei 2001

Andi Hamzah, 1991, *Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Andi Hamzah, 2002. *"Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara"*. Sumber Ilmu Jaya, Jakarta

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

Andi Hamzah. *"Ide yang Melatarbelakangi Pembalikan Beban Pembuktian"*. Makalah pada Seminar Nasional Debat Publik tentang Pembalikan Beban Pembuktian, Rabu 11 Juli 2001 di Universitas Trisakti

Barda Nawawi Arief,. 2001. *"Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan"*. Citra Aditya Bakti, Bandung

Anshoruddin, 2004. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar

Antonius. *"Penegakan Hukum Pidana Terhadap Warga Masyarakat yang Melakukan Kegiatan Tanpa Izin di Bandar Udara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 (Studi Di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya)"*.

Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002)

Delliyana Shanty, 1998, *"Konsep Penegakan Hukum"*. Liberty, Yogyakarta

Departemen Kehakiman & HAM, Tim Pakar Hukum. 2002. *Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia*. Catatan dan Gagasan Prof Yusril Ihza Mahendra

Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta

Ginanjari Wahyudi. 2011. "*Kajian Tentang Penyusunan Sebagai Salah Satu Bentuk Tindak Pidana Korupsi*". Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Hamzah Ahmad dan Anando Santoso, 1996, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Fajar Mulia, Surabaya

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. "*Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi*". Jakarta: Kemendikbud. 2011

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Komisi Pemberantasan Korupsi. "*Memahami Untuk Membasmi*". KPK, Jakarta

M. Yahya Harahap. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Jakarta. Sinar Grafika.

Martiman Prodjohamidjojo *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, (Bandung: Mandar Maju, 2001)

Martiman Prodjohamidjojo. 2001 "*Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)*". Mandar Maju, Bandung

Mochtar Lubis dan James C. Scott, 1995, *Bunga Rampai Korupsi Cet. Ke-3*, LP3ES, Jakarta

P.A.F. Lamintang, 2009, *Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika

R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor

R. Subekti, 2008. *Hukum Pembuktian*. Jakarta. Pradnya Paramita

- R.Wiyono, 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi edisi ke-2*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi, Alihbahasa Hermoyo, Cet. Ke-2*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- S. H. Alatas, 1986, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta
- Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Surachmin & Suhandi Cahaya, 2015, *Strategi dan Teknik Korupsi: Mengetahui untuk Mencegah*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Titin Ulfiah, 2017, *Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi di Pengadilan Tipikor Semarang dalam Tinjauan Hukum Islam dan Positif*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

B. Jurnal

- Agustinus Samosir. "Pembuktian Terbalik: Suatu Kajian Teoretis Terhadap Tindak Pidana Korupsi". Jurnal Hukum Progresif, Vol.XI, No.1, Juni 2017
- Lestari Victoria Sinaga, dkk. "Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Perkara Gratifikasi". USU Law Jurnal, Vol.4, No.2, Maret 2016
- M. Edo Rezawan Prasetya, dkk. "Sistem Pembuktian Terbalik dalam Pembuktian Perkara Gratifikasi". Jurnal Verstek, Vol.2, No.2, 2014
- M. Nurul Irfan. "Gratifikasi di Mahkamah Konstitusi dan Wacana Hukuman Mati". Jurnal Hukum Madania, Vol.XVIII, No.2, Desember 2014
- Marwan Effendy, "Pembalikan Beban Pembuktian dan Implementasinya dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.39, No.1, Januari-Maret 2009
- Nitralia Prameswari, dkk. "Kedudukan Alat Bukti Petunjuk di Ranah Hukum Acara Pidana". Jurnal Verstek Vol.3, NO.2, 2015

Nur Mauliddar, dkk. *“Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol.19, No.1, April 2017

RB. Soemanto, dkk. *“Pemahaman Masyarakat tentang Korupsi”*. Yustisia. Vol.3. No.1. Januari-April 2014

Ria Ayu Novita, dkk. *“Efektivitas Pelaksanaan undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo”*, Diponegoro Law Journal, Vol.6, No.2, 2017.

Susanti Ante. *“Pembuktian dan Putusan Pengadilan dalam Acara Pidana”*. Lex Crimen, Vol.II, No.2, April-Juni 2013

C. Internet

Data Statistik Kasus Gratifikasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (<https://www.kpk.go.id/id/statistik/gratifikasi/109-statistik>, diakses pada 15 Oktober 2020)

D. Undang-Undang

Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi